

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SELF-DISCLOSURE  
ANDROGINI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL**

**Andi Ici Yanti<sup>1</sup>, Andi Alfhito Ardiansyah<sup>2</sup>, Elieser Gerry Rapar<sup>3</sup>, Yulianus Panca Matana<sup>4</sup>,  
Anisa Iriani<sup>5</sup>, Muh. Djaelani Prasetya<sup>6</sup>**  
[andiiciyanti1212@gmail.com](mailto:andiiciyanti1212@gmail.com)<sup>1</sup>, [andialfhitoardiansyah63@gmail.com](mailto:andialfhitoardiansyah63@gmail.com)<sup>2</sup>, [eliesergerryr@gmail.com](mailto:eliesergerryr@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[pancam15@gmail.com](mailto:pancam15@gmail.com)<sup>4</sup>, [anisairiani0105@gmail.com](mailto:anisairiani0105@gmail.com)<sup>5</sup>, [djaeprasetya@unhas.ac.id](mailto:djaeprasetya@unhas.ac.id)<sup>6</sup>  
**Universitas Hasanuddin**

**Abstrak:** Penelitian ini menginvestigasi keberadaan androgini dan persepsi masyarakat terhadap individu androgini yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial di Kota Makassar. Androgini, yang didefinisikan sebagai individu dengan karakteristik atau penampilan fisik yang tidak memihak pada jenis kelamin tertentu, sering menghadapi tantangan sosial dan kesehatan yang serius. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang menggabungkan analisis teks hukum dengan pengumpulan dan analisis data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa androgini sering mengalami perilaku tidak adil dan diskriminatif, termasuk kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, serta diskriminasi dari lembaga-lembaga publik. Mereka juga mengalami tekanan psikologis dan penolakan dari keluarga dan masyarakat. Sebagai akibatnya, banyak dari mereka terpaksa menjadi pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks ini, responden androgini mengekspresikan kebutuhan mereka akan perlindungan hukum yang komprehensif. Mereka berharap untuk diperlakukan sama di masyarakat, memiliki akses tanpa diskriminasi ke layanan publik, dan merasa aman dari gangguan dan ancaman. Dalam pembahasan, penelitian ini menyoroti perlunya tindakan tegas dari pemerintah Kota Makassar untuk melindungi hak-hak androgini, mengatasi diskriminasi, dan memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang perlindungan hukum yang diperlukan untuk individu androgini dalam konteks pekerjaan seks komersial di Kota Makassar.

**Kata Kunci:** Androgyny, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Androgini adalah istilah yang menggambarkan karakteristik atau penampilan fisik yang tidak jelas atau tidak memihak pada jenis kelamin tertentu, yaitu tidak terlihat jelas sebagai laki-laki atau perempuan. Secara medis, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana seseorang memiliki kadar hormon seksual yang kurang jelas atau tidak stabil, sehingga menimbulkan ciri-ciri fisik yang kurang jelas antara laki-laki dan perempuan. Namun, istilah androgini seringkali lebih banyak digunakan dalam konteks sosial dan budaya, yang mencakup penampilan, gaya hidup, perilaku, dan karakteristik kepribadian yang tidak memihak pada jenis kelamin tertentu, dan dapat mencakup laki-laki, perempuan, maupun orang non-biner atau genderqueer (Feelsafat, 2021).

Menurut data statistik yang dimiliki Persatuan Androgini Republik Indonesia, jumlah Androgini yang terdata dan memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3.887.000 jiwa pada tahun 2007. Survei kualitas hidup Androgini di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Atma Jaya Jakarta pada tahun 2016 menunjukkan bahwa estimasi jumlah Androgini di Indonesia pada 2011 adalah sekitar 38.000 orang dan mengalami peningkatan hampir 30 persen bila dibandingkan dengan data yang tersedia. Artikel dari TribunNews.com pada tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat sekitar tujuh juta Androgini di Indonesia dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. Artikel dari detikNews pada tahun 2013 menyebutkan bahwa berdasarkan data, jumlah Androgini seluruh Indonesia mencapai 7 juta orang. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah Androgini di Indonesia masih cukup besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Androgini dalam tatanan integrasi kehidupan manusia harus diatur agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam undang-undang no.1 ayat (1) Pasal 39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 menyatakan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga diperlukan Perlindungan hukum sama di depan hukum dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) UU HAM No. 39 Tahun 1999. Munculnya pekerja seks komersial merupakan konsekuensi dari berbagai konsekuensi kekinian. Kebutuhan hidup Pekerja seks komersial androgini disertifikasi secara legal berdasarkan identitas pribadi dan biologisnya, sama seperti laki-laki pada umumnya (Kusumawati, 2021).

Keberadaan androgini ini sering terpinggirkan oleh masyarakat terutama di Kota Makassar dan membuat androgini sulit mendapat pekerjaan yang layak. Sehingga banyak dari mereka menjadi pekerja seks komersial (PSK) untuk menyambung hidup. Salah satu kasus yang ditemukan oleh tim Dinas Sosial Kota Makassar, yang berhasil mengamankan dua androgini masing-masing dengan pasangannya. Keempatnya tengah berbuat asusila di daerah sekitar pemakaman Panaikang Kota Makassar kasus ini terjadi pada 19 Mei 2019. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti yang dilakukan pada tanggal 18 februari 2023 aktivitas tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Fenomena tersebut jelas telah melanggar etika dan nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat kota makassar. Namun pemerintah kota makassar belum melakukan tindakan tegas untuk mengatasi hal tersebut (Rakyatku.com, 2019).

Institute for Criminal Justice Reform ICJR dalam pernyataan tertulisnya menyatakan setidaknya ada dua hal yang memicu terus maraknya penganiayaan terhadap kelompok minoritas seksual. "Pertama, tidak ada keseriusan dari negara untuk menindak tegas segala bentuk propaganda kebencian yang ditujukan terhadap kelompok minoritas tersebut sehingga membuat konflik horizontal dalam masyarakat semakin menguat dan tidak terkendali. Kedua, banyaknya peraturan-peraturan daerah yang bersifat diskriminatif atau yang secara langsung menyudutkan kelompok minoritas seksual sebagai kelompok yang terpinggirkan seakan-akan melegitimasi perlakuan-perlakuan masyarakat yang mengarah pada kekerasan terhadap kelompok minoritas seksual. Oleh karena itu, penelitian ini

dilakukan untuk menemukan model perlindungan hukum yang komprehensif bagi individu androgini yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial, untuk dijadikan acuan evaluasi bagi pemerintah Kota Makassar untuk membuat peraturan daerah terkait keberadaan androgini yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, untuk mengetahui masalah yang ditimbulkan terkait keberadaan androgini sebagai manusia yang dapat direndahkan dalam kesehariannya baik dari segi sosial dan kesehatan yang dapat memunculkan konflik hingga bahaya terhadap anak yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung (Simanjuntak dan Afrido, 1997).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian gabungan, atau *mixed-methods research*, adalah jenis penelitian yang menggabungkan elemen-elemen dari penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena atau topik penelitian dengan memanfaatkan kekuatan dan kelebihan masing-masing jenis penelitian. Penelitian gabungan mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan atau secara berurutan. Ini memungkinkan peneliti untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Jl. Taman Makam Pahlawan, Paropo, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih wilayah tersebut karena dianggap sebagai representatif dari eksistensi self-disclosure androgini di Kota Makassar yang dikenal banyak kalangan. Hasil penelitian disimpulkan dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Peneliti menyajikan hasil penelitian secara jelas dan ringkas, membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya, dan memberikan interpretasi hasil penelitian yang komprehensif. Sehingga penarikan kesimpulan dari penelitian dilakukan secara sistematis dan metodis, sehingga penelitian yang diperoleh dapat dikatakan akurat dan terpercaya. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keberadaan dan pandangan masyarakat terhadap androgini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Masalah yang ditimbulkan terkait keberadaan androgini sebagai manusia yang dapat Di rendahkan dalam kesehariannya baik dari segi sosial dan kesehatan yang dapat memunculkan konflik.**

60 responden androgini berhasil untuk ditemui dan dijadikan subjek penelitian. sebanyak 37 (62%) di antaranya secara konsisten mengungkapkan pengalaman mereka yang pahit terkait dengan perilaku tidak adil dan diskriminatif yang mereka alami. Terlihat bahwa androgini seringkali menjadi korban kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Pemukulan, penyerangan, atau penganiayaan fisik merupakan ancaman yang nyata dalam kehidupan mereka. Selain itu, mereka juga sering menghadapi perlakuan kasar, penghinaan, ejekan, atau pelecehan verbal yang merendahkan martabat mereka. Tidak hanya itu, tekanan psikologis yang mereka alami sangat mengkhawatirkan, dengan intimidasi, pengucilan sosial, diskriminasi, atau penolakan dari keluarga, teman, atau masyarakat umum menjadi beban yang sangat berat. Pada tingkat yang lebih luas, mereka juga menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil dari lembaga-lembaga publik, termasuk aparat kepolisian, sistem peradilan, atau lembaga pemerintah lainnya.

### **2. Model Perlindungan Hukum yang komprehensif bagi individu androgini yang berprofesi sebagai Pekerja seks komersial**

60 responden androgini berhasil untuk ditemui dan dijadikan subjek penelitian. sebanyak 48 (80 %) di antaranya secara konsisten mengungkapkan membutuhkan perlindungan hukum berupa keamanan dan jaminan untuk diperlakukan sama di lingkungan sosial dan mampu mengakses layanan publik tanpa di diskriminasi. Dari semua temuan ini, terlihat dengan jelas bahwa perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia androgini sebagai pekerja seks komersial di Kota Makassar menjadi

sangat penting. Hal ini menggarisbawahi perlunya tindakan nyata dan berkelanjutan dalam mengatasi diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak mereka. Kebijakan dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka, serta memastikan akses yang sama terhadap layanan publik untuk androgini. langkah yang kemudian menjadi solusi nyata agar androgini mendapatkan perlindungan hukum yakni dengan menciptakan aplikasi "GuardShield: Protecting Minorities".

"GuardShield" adalah aplikasi seluler inovatif yang dirancang untuk memberikan dukungan dan perlindungan hukum kepada kelompok minoritas yang mungkin menjadi korban kekerasan dan diskriminasi di lingkungannya. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan solusi yang aman dan terpercaya bagi mereka yang memerlukan perlindungan hukum dan bantuan dalam menghadapi situasi yang tidak aman.

Fitur Utama yang terdapat dalam aplikasi ini (1) Laporan Kekerasan, Pengguna dapat dengan mudah melaporkan insiden kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi yang mereka alami dengan mengisi formulir laporan yang disesuaikan. Laporan ini akan dikirim secara langsung ke pihak berwenang yang relevan; (2) Peta Keamanan, Aplikasi menyediakan peta interaktif yang menunjukkan daerah-daerah yang mungkin berisiko tinggi bagi kelompok minoritas. Hal ini membantu pengguna untuk menghindari daerah berisiko atau meningkatkan kewaspadaan mereka; (3) Konseling dan Dukungan, "GuardShield" memiliki fitur layanan konseling dan dukungan emosional. Pengguna dapat terhubung dengan profesional yang bersedia mendengarkan dan memberikan saran; (4) Informasi Hukum, Aplikasi ini memberikan akses ke informasi hukum yang relevan bagi kelompok minoritas. Pengguna dapat memahami hak-hak mereka dan tahu apa yang dapat dilakukan dalam situasi tertentu; (5) Komunitas Dukungan, Pengguna dapat bergabung dengan komunitas dukungan di dalam aplikasi, di mana mereka dapat berbagi pengalaman, memberikan dukungan satu sama lain, dan berkolaborasi untuk mencari solusi; (6) Notifikasi Darurat, Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan notifikasi darurat secara cepat kepada kontak darurat mereka jika mereka berada dalam bahaya atau memerlukan bantuan segera.

Keunggulan Aplikasi "GuardShield: Protecting Minorities" (1) Keamanan dan Anonimitas, Aplikasi ini menjamin kerahasiaan dan anonimitas pengguna. Laporan dan informasi pribadi dijaga dengan ketat; (2) Kolaborasi dengan Pemerintah, "GuardShield" bekerja sama dengan pihak berwenang dan lembaga pemerintah terkait untuk memastikan laporan segera ditindaklanjuti; (3) Pendidikan dan Kesadaran, Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat pendidikan dan kesadaran untuk memerangi stereotip dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas; (4) Dukungan Multibahasa, "GuardShield" tersedia dalam beberapa bahasa untuk memastikan aksesibilitas yang lebih luas.

Aplikasi "GuardShield" bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi kelompok minoritas, serta memberikan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Model Perlindungan Hukum dengan Upaya ini harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mencapai tujuan tersebut dan menghapuskan diskriminasi terhadap androgini di masyarakat, Hal ini sejalan dengan model perlindungan hukum berdasarkan Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

## **KESIMPULAN**

Androgini yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di Kota Makassar menghadapi tantangan sosial dan kesehatan serius. Mereka sering menjadi korban berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, serta diskriminasi dari lembaga-lembaga publik. Mereka juga mengalami tekanan psikologis dan penolakan dari keluarga dan masyarakat.

Sebagai hasilnya, banyak dari mereka terpaksa menjadi pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Androgini yang menjadi subjek penelitian mengungkapkan kebutuhan mereka akan perlindungan hukum yang komprehensif. Mereka berharap untuk diperlakukan sama di masyarakat, memiliki akses tanpa diskriminasi ke layanan publik, dan merasa aman dari gangguan dan ancaman. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat dan tindakan tegas dari pemerintah Kota Makassar diperlukan untuk melindungi hak-hak androgini, mengatasi diskriminasi, dan memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi untuk menciptakan aplikasi seluler inovatif yang disebut "GuardShield: Protecting Minorities." Aplikasi ini dirancang untuk memberikan dukungan dan perlindungan hukum kepada kelompok minoritas, termasuk androgini, yang mungkin menjadi korban kekerasan dan diskriminasi di lingkungannya. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur, termasuk pelaporan kekerasan, peta keamanan, konseling dan dukungan, informasi hukum, komunitas dukungan, dan notifikasi darurat. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi kelompok minoritas, perlindungan hukum yang lebih baik, serta aplikasi inovatif seperti "GuardShield," perlu melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Kesimpulannya, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang perlindungan hukum yang diperlukan untuk individu androgini yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial di Kota Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Butt, Simon and Tim Lindsey. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Gunakaya, A. Widiada. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: STHB Press, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edited by Tarmizi. Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Imaniyati, Neni Sri, Asep Rozali, dan Neneng Nurhasanah. *Menimbang Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)*. Bandung: Pusat Penerbitan Univesitas (P2U) LPPM Universitas Islam Bandung, 2017.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Pub. L. No. 67 Tahun 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 863 K/PDT/2020 (2020)*.
- Nott, Jemma. "China's Belt and Road (BRI): Investment and Lending Practices in Developing Countries. Is There a "Debt Trap"?" <https://www.globalresearch.ca/chinas-belt-and-road-bri-investment-and-lending-practices-in-developing-countries-is-there-a-debt-trap/5722107>, 2020.
- Priyatno, Dwidja dan Kristian. *Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum Dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019.
- Saragih, Bonarsius. "Kebijakan Pengawasan Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Sebagai Penegak Hukum Yang Profesional Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2015).
- Soenandar, Taryana, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dan Heru Soeprapto. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Stamper, Kory. "From 'F-Bomb' to 'Photobomb,' How the Dictionary Keeps Up with English." Interview by Terry Gross, 19 April 2017.
- Sugiarto, Irwan. "The Significance of Good Corporate Governance Principles in The Company Law of 2007." *Mimbar: Sosial Dan Pembangunan* 33, No. 1 (2017): 37–45. doi:http://dx.
- Taufik, Giri Ahmad. 'Freeport Dan Posisi Hukum RI'. *Kompas*, 20 March 2017.
- Widyantini, Rini, et.al. *Bunga Rampai Pertanggungjawaban Hukum Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Edited by Zainal

Muttaqin. Bandung: Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017.

Winata, Agung Sujati. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2018).